



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 869/VI/2015

V/JUNI 2015



Paripurna DPR Setujui UP2DP



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

Paripurna DPR Setujui UP2DP



Ketua Panja UP2DP Totok Daryanto saat Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPR memutuskan menyetujui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Persetujuan ini dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta persetujuan dari para peserta rapat. “Jadi apakah wacana dana aspirasi ini disetujui?” tanya Fahri dan dijawab setuju para anggota dewan di ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (23/6).

Fahri menegaskan, segala bentuk pokok pembahasan detail dapat dibahas di komisi-komisi atau Fraksi terkait, termasuk adanya beberapa pendapat yang menolak usulan dana aspirasi tersebut.

Sementara itu dalam laporannya di hadapan para peserta rapat Paripurna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiryono menyampaikan, terdapat tiga dari tujuh fraksi menyatakan menolak program dana aspirasi. “Adapun tiga fraksi yang menolak ialah PDIP, Nasdem dan Hanura,” jelas Sareh.

Ketua Panja UP2DP Totok Daryanto mengatakan, penyampaian program Dapil harus diintegrasikan didalam program pembangunan nasional dalam APBN. “Pengintegrasian usulan program pembangunan daerah pemilihan dalam program pembangunan nasional memiliki makna bahwa usulan program tersebut harus selaras dan terintegrasi dengan RKP yang merupakan pedoman utama dalam penyusunan APBN,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya Program Pembangunan Daerah Pemilihan diharapkan terjadinya keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan daerah karena adanya keterwakilan usulan program daerah ke dalam perencanaan pembangunan nasional. “Waktu pengusulan UP2DP nantinya akan dilakukan selambat-lambatnya bulan Maret setiap tahun sidang, namun untuk program tahun 2016, usulan tersebut akan disampaikan pada awal Juli 2015,” paparnya. (Si), foto : andri/parle/hr.

Pelaksana UP2DP Pemerintah Bukan DPR



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon mengatakan, terkait pelaksana UP2DP atau usulan program pembangunan daerah pemilihan yang melaksanakan adalah pemerintah selaku eksekutif.

“Jadi jangan kita melihat ini suatu dana yang diserahkan kepada Anggota DPR, tapi Anggota DPR mengusulkan Program kepada tim yang selanjutnya akan dibawa ke Pemerintah, tetap pelaksanaannya adalah Pemerintah” terangnya kepada Parlementaria, Rabu Sore, (24/6).

Fadli mengatakan, Paripurna telah menyepakati UP2DP, kemudian usulan program itu nantinya akan dibawa



ke Rapat Paripurna pada 1 Juli mendatang.

“Kita semua berharap program ini dapat berjalan sebagai jawaban bahwa masyarakat juga memerlukan program-program yang diperjuangkan oleh Anggota DPR yang mewakili mereka. Ini merupakan program usulan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Usulan program pembangunan daerah pemilihan tersebut dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang nantinya akan diintegrasikan kedalam program pembangunan nasional. Memiliki makna bahwa usulan program tersebut harus selaras dan terintegrasi dengan RKP

yang merupakan pedoman utama dalam penyusunan APBN.

Waktu pengusulan UP2DP ini nantinya akan dilakukan selambat-lambatnya bulan Maret setiap tahun sidang. Namun untuk program tahun 2016 usulan tersebut akan disampaikan pada awal Juli 2015 ini. (agung) Foto: Jaka Nugraha/parle/od

Silaturahmi Untuk Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan



Ketua DPR RI Setya Novanto Berjabat Tangan Dengan Presiden Joko Widodo

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mulia dan bulan yang sangat berbahagia bermakna. Menjadi momen tepat untuk meningkatkan amal dan ibadah kita pada Allah SWT, dan silaturahmi kepada sesama umat manusia.

Demikian diungkapkan Ketua DPR Setya Novanto saat memberikan sambutan pada acara buka puasa bersama di kediamannya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Selasa (23/06). Acara ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator, dan segenap Menteri di Kabinet Kerja.

Hadir pula Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua Umum beberapa partai politik, Wakil Ketua DPR, Pimpinan Komisi DPR, Ketua Fraksi DPR, hingga para Duta Besar.

“Silaturahmi untuk saling mengunjungi dari rumah ke rumah, suatu tradisi yang tidak bisa kita tinggalkan di dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Khususnya silaturahmi di bulan Ramadhan ini dapat meningkatkan persatuan, kesatuan, dan saling bahu membahu demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan juga masa depan bangsa ke depan,” kata Novanto.

Politisi Golkar ini berharap, dengan acara silaturahmi para Pimpinan Lembaga Negara ini dapat menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.

“Dengan kehadiran Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di sini merupakan satu persatuan yang luar biasa. Apabila DPR kuat, Pemerintah kuat, dengan didukung oleh KIH dan KMP secara rukun, maka ekonomi kita semakin baik,” kata Novanto.

Dalam kesempatan itu, Novanto juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo yang ke 54 tahun pada 21 Juni 2015 lalu. Ia berharap, ke depannya Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi

pemimpin negara yang amanah, dan barokah.

“Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo yang ke 54, meskipun terlambat. Jadi kalau 54 itu, hokinya tinggi. Lima ditambah empat, jadi sembilan. Sembilan itu sudah angka yang paling tinggi, sehingga bisa menjadi presiden,” imbuh Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur itu.

Novanto juga berharap, di umur yang baru ini, Presiden selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia akhirat.

“Ngaturaken sugeng tambah yuswo ingkang kaping seket sekawan, mugi tansah piningan sehat, panjang yuswo (Kami menghaturkan selamat ulang tahun ke 54, semoga selalu diberi kesehatan, dan panjang umur). Semoga panjang umur, slamet ndunyo akhirat (selamat dunia akhirat), mardyo lahir batos sekeluarga sakukuban (bahagia lahir batin sekeluarga). Amin,” harap Novanto.

Acara buka puasa bersama ini semakin spesial, karena Novanto menghadirkan makanan kegemaran Presiden Joko Widodo. Novanto sengaja mendatangkan koki dari rumah makan Mbah Citro, Solo.

“Pak Presiden pasti akan kaget, karena saya membawa delapan orang (koki) dari Solo. Ini makanan yang disukai Pak Presiden, jadi ada mie, nasi goreng, dan capcay. Ini Mie Goreng dari Mbah Citro, Solo. Mie ini kan kalau dimakan panjang, semoga umurnya makin panjang. Nanti kalau mau jadi capres, harus makan mie ini,” imbuh Novanto, yang disambut senyum Presiden. (sf) foto: denus.parle/hr

DPR Serap Aspirasi Terkait Calon Kepala BIN

DPR sudah menerima surat pengajuan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo, pekan lalu. Presiden mengajukan nama Sutiyoso untuk menjabat sebagai orang nomor satu di lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi I DPR ini.

Sebelum DPR menindaklanjuti surat ajuan ini, DPR menerima banyak aspirasi dan masukan tentang figur calon. Sebagian berbentuk lisan, sebagian perwakilan yang mendatangi DPR. Namun sebagian besar menolak pencalonan Sutiyoso.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon, usai menerima perwakilan Koalisi Peduli Indonesia, di ruang rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jumat (19/06/15).

“Kita akan menyerap aspirasi dari masyarakat mengenai pencalonan Kepala BIN ini. Kita hanya sebatas menampung, nanti akan kami kirimkan ke Komisi terkait dan Pemerintah dalam memberikan pertimbangan. Intinya,

banyak yang menolak, karena alasan-nya dari partai politik,” jelas Fadli.

Jika diperlukan, tambah Politisi F-Gerindra ini, segala aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat ini juga akan disampaikan kepada Presiden. Dalam peraturan Undang-undang, DPR memiliki waktu 20 hari kerja dalam memproses surat pengajuan ini.

“Kami mempunyai banyak waktu untuk mendiskusikan ini, memberi pertimbangan yang komprehensif terhadap sosok calon yang diajukan Presiden. Kami berharap, dalam mengajukan nama calon Kepala BIN, seharusnya Presiden memberikan calon yang independen, netral, dan punya latar belakang di bidang intelijen,” pesan Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini.

Sebelumnya, Ketua Umum OKP Komiti Koalisi Peduli Indonesia, Ahmad Hadi menyampaikan bahwa pihaknya secara tegas menolak pencalonan Sutiyoso menjadi calon Kepala BIN. Pihaknya juga meminta kepada Presiden untuk mengajukan nama baru calon Kepala BIN yang lebih baik, tidak



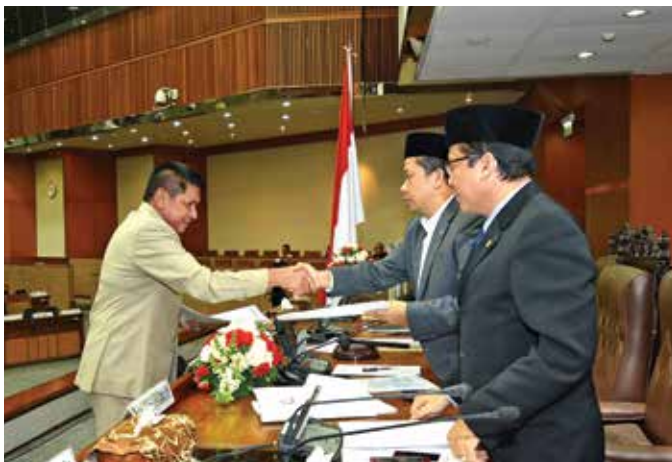
Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon

menjadi bagian dari parpol, independen, dan memiliki rekam jejak di dunia intelijen.

“Kami meminta kepada Komisi I dan Pimpinan DPR untuk mengembalikan surat Presiden terkait pencalonan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Kami juga meminta kepada DPR untuk bekerja sama dengan KPK dan PPAK serta instansi lain dalam menelusuri rekam jejak kandidat Kepala BIN,” jelas Hadi.

Koalisi Peduli Indonesia juga berharap, agar Komisi I DPR mengedepankan nurani dan objektivitas dalam melihat sosok calon kepala BIN. (sf), foto : naefuroji/parle/hr.

Paripurna DPR Tetapkan 2 RUU Tambahan dan 2 RUU Pengganti



Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sareh Wiyono Menyampaikan Laporan saat Rapat Paripurna

DPR sepakat menambahkan dua Rancangan Undang-undang (RUU) Tambahan dan dua RUU Pengganti dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2015. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Se-

lasa (23/6).

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sareh Wiyono dalam laporannya yang dibacakan di sidang paripurna menjelaskan dua RUU tambahan tersebut adalah RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Bea Materai. RUU Kebudayaan menjadi sangat penting dalam pelestarian kebudayaan bangsa.

Urgensi disusunnya RUU ini tak lain adalah untuk meneguhkan jati diri bangsa, membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan bangsa, dan meningkatkan citra bangsa. RUU Kebudayaan juga sangat penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif, sinergis dan strategis terhadap degradasi kebudayaan di Indonesia.

RUU tentang Bea Materai menjadi RUU Tambahan mengingat UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai sudah tidak sesuai dengan perkembangan di bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya. RUU ini juga terkait dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri tahun 2016 untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Sementara RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tum-

bahan menggantikan RUU tentang Kedaulatan Pangan. Hal ini mengingat UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perkarantina. RUU ini juga sebagai upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Dan yang terpenting RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, hama, dan penyakit ikan serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah Indonesia dalam satu

sistem yang maju dan tangguh.

Satu RUU pengganti lainnya adalah RUU tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan RUU tentang perubahan atas UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Urgensi dari RUU pengganti ini diantaranya untuk mengatur kewenangan penyadapan yang tidak menimbulkan pelanggaran HAM, dan penguatan terhadap pengaturan kolektif kolejal. (Ayu), foto : andri/parle/hr.

Belanda Belum Akui Kemerdekaan RI Secara *De Jure*

DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) menerima pesan-pesan yang disampaikan KUKB (Komite Utang Kehormatan Belanda) dipimpin Batara R. Hutagalung bahwa hingga kini Pemerintah Kerajaan Belanda belum mengakui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Belanda masih membuat suatu pengakuan *de facto* sejauh ini tetapi pengakuan *de jure* belum pernah. Hanya mereka (Belanda) menyampaikan bahwa penyerahan kedaulatan itu pada tanggal 27 Desember 1949.

“Saya kira kita (Bangsa Indonesia) sudah waktunya meminta kepada pihak Kerajaan Belanda dalam rangka 70 Tahun Indonesia Merdeka ini mereka bisa mengakui secara *de jure* kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus Tahun 1945,” kata Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon, Rabu (24/6), di Gedung Nusantara DPR, Jakarta.

Fadli mengatakan hal ini sangat penting yang diingatkan oleh tokoh-tokoh KUKB beberapa tahun memperjuangkan ini, yang juga sudah sampai ke Belanda bertemu dengan Parlemen Belanda bahkan juga Pemerintah Belanda.

Menurutnya, ini sudah waktunya DPR RI juga menyambut baik apa yang sudah disampaikan. “DPR RI akan menyampaikan Surat kepada Parlemen Belanda agar mereka memberikan suatu respon sesuai dengan harapan dari masyarakat Indonesia yaitu pengakuan 70 Tahun Indonesia Merdeka pada 17 Agustus Tahun 2015 ini,” tegas Fadli Zon.

DPR yang mempunyai fungsi diplo-



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon menerima KUKB (Komite Utang Kehormatan Belanda)

masi tidak hanya sebatas surat yang disampaikan. Dijelaskannya, mulanya surat dahulu, dokumen terlampir akan kita sampaikan dengan dasar-dasar yang sudah jelas, dan petisi.

Dia sendiri pernah menyampaikan hal ini kepada Duta Besar Belanda untuk RI, terkait Kapan Belanda mengakui secara *de jure* 17 Agustus Tahun 1945 sebagai hari kemerdekaan kita.

Batara R.Hutagalung mengatakan perjuangan KUKB ini terkait masalah kedaulatan negara dan martabat bangsa.

Dia menjelaskan bahwa pada bulan Agustus Tahun 2005 Menlu Belanda pada waktu itu menyatakan Belanda menerima *de facto* kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Menurut KUKB,

artinya disini agak aneh bahwa sampai 16 Agustus 2005, NKRI untuk Pemerintah Belanda tidak eksis sama sekali.

“Ini tentunya membuat terkejut bangsa Indonesia. Karena masalahnya diakuinya agak aneh Tahun 1947 pada perjanjian Linggar Jati Pemerintah Belanda sudah menerima *de facto*, mengapa tahun 2005 *de facto* lagi,” ungkapnya.

Intinya kalau kedua negara mau berhubungan diplomatik maka keduanya harus saling mengakui. “Menjadi pertanyaan kalau yang satu tidak mengakui yang lain. Ini yang menjadi disebut hubungan janggal antara Indonesia dengan Kerajaan Belanda” imbuhnya. (agung) Foto: Jaka Nugraha/parle/hr

Komisi X Ancam Tak Setujui RAPBN 2016 Kemenpora



Jajaran Pimpinan Komisi X Saat Konpress Pembatalan Raker dengan Menpora

Komisi X DPR mempertimbangkan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016 yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga jika Kemenpora tidak melaksanakan hasil raker dengan Komisi X pada 10 Juni 2015. Kesimpulan raker tersebut adalah dalam upaya pembenahan tata kelola persepakbolaan nasional, Komisi X mendesak Menpora untuk melakukan pertemuan dengan PSSI paling lambat tanggal 23 Juni 2015.

“Apabila hasil-hasil keputusan rapat kerja tersebut tidak dilaksanakan, Komisi X DPR RI akan mempertimbang-

kan persetujuan terkait pembahasan RAPBN TA 2016 yang diajukan oleh Menpora,” kata Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam dalam konferensi pers di Ruang Wartawan, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/06/15).

Ia menekankan Komisi X memandang Menpora tidak memiliki niat baik karena sampai batas waktu tanggal 23 Juni 2015 belum melakukan pertemuan dengan PSSI hasil KLB Surabaya 2015 yang diakui FIFA. Hisjam dalam acara tersebut bicara didampingi dua Wakil Ketua lainnya yaitu Sohibil Iman (FPKS) dan Nuroji (FP Gerindra) serta anggota

Komisi X Zulfadhli.

Sedianya, tambah Politisi F-PG ini, Komisi X akan melakukan raker dengan Menpora pada Rabu (24/06/15) pukul 13.00, namun karena Menpora tidak mengadakan pertemuan dengan PSSI, Komisi X memutuskan untuk membatalkan rapat kerja. Hal ini menjadi kesepakatan dalam rapat intern Komisi X.

“Rapat intern juga memutuskan Komisi X akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR untuk menanyakan perkembangan surat Pimpinan DPR kepada Presiden tanggal 28 Mei 2015, untuk meminta Presiden memerintahkan Menpora segera mengakhiri kisruh permasalahan sepakbola nasional,” imbuh politisi asal Dapil Jawa Timur.

Disamping kekisruhan sepak bola nasional, Kemenpora dinilai juga gagal meraih hasil optimal dalam SeaGames 2015 di Singapura, sehingga bisa disimpulkan anggaran yang diberikan selama ini tidak berdampak positif terhadap perkembangan olahraga di tanah air.

“Perlu dilakukan revisi kebijakan Menpora terhadap prestasi olahraga secara nasional. Bukan saja sepakbola, tapi juga cabang olahraga yang lain,” tutup Hisjam. (sf) Foto: Naefuroji/parle/od

Komisi VIII Pertanyakan Minimnya Penyerapan Anggaran Kemenag

Komisi VIII DPR RI mempertanyakan penyerapan anggaran 2015 Kementerian Agama yang masih sangat minim dan jauh dari harapan. Hal tersebut terungkap saat rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, Rabu (24/6) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta.

“Apa kendala yang dialami oleh Kementerian agama sehingga realisasi atau penyerapan anggaran hingga 23 Juni baru mencapai 13,505 Triliun atau

sekitar 22,40 persen dari total anggaran Kemenag tahun 2015 yang sebesar 60,291 Triliun,” tanya anggota Komisi VIII, Asli Chaidir.

Asli memaklumi kendala yang dipaparkan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan program dan anggaran Kemenag 2015. Namun ia menyayangkan, penyerapan terendah ada pada belanja bantuan sosial dimana dari 2,231 Triliun anggaran yang dianggarkan, baru terserap sebesar 177,284



Anggota Komisi VIII DPR RI, Asli Chaidir

Miliar atau sekitar 7,94 persen dari yang dianggarkan. Padahal program bansos ini sangat penting karena lang-

sung berhubungan atau terkait dengan masyarakat, dan pastinya sangat dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay yang memimpin rapat tersebut mempertanyakan kesanggupan Kementerian Agama dalam menyerap sisa anggaran 2015 sejumlah 77,60 persen dalam waktu hanya sekitar enam bulan ke depan.

“Apakah dalam waktu enam bulan anggaran Kemenag 2015 yang sebesar 60,291 Triliun itu bisa diserap

semua?melihat di bulan Juni 2015 ini saja penyerapannya masih jauh dari anggaran yang telah ditetapkan. Bagaimana mungkin Kemenag meminta penambahan anggaran sebesar 13,77 Triliun pada APBN (anggaran pendapatan belanja nasional) 2016 mendatang,”tanya Saleh.

Dalam laporannya Menteri Agama menjelaskan hambatan yang dialami hingga menyebabkan pelaksanaan program dan anggaran Kemenag 2015 hingga Juni 2015 ini masih terbelang rendah. Diantaranya pengalihan ang-

garan perjalanan dinas termasuk yang melekat pada kegiatan sehingga kegiatan tidak dapat dijalankan.

Selain itu, hambatan lain terkait kebijakan tidak melaksanakan kegiatan di hotel mengakibatkan antrian penggunaan fasilitas kantor yang terbatas. Kebijakan perubahan bantuan sosial ke belanja barang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan anggaran Kemenag 2015. Serta perubahan rencana kerja pemerintah (RKP) dari bantuan siswa miskin ke Kartu Indonesia Pintar (KIP). (Ayu) foto: andri/parle/hr

Komisi III Segera Bahas RUU KUHP

Komisi III DPR akan memulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman di ruang rapat Komisi III Kamis siang(18/6).

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan bahwa dalam prolegnas Tahun 2015-2019 DPR bersama-sama dengan pemerintah mencanangkan pembaharuan sistem peradilan pidana terpadu. Maka pada tahun ini akan dimulai dengan pembahasan RUU KUHP sebagai hukum materil. Terkait dengan pembahasan KUHP ini Komisi III DPR sebagai legislator memerlukan pandangan dan masukan dari KPK.

Terkait dengan prinsip yang dianut dalam KUHP untuk melakukan konsolidasi atas hukum pidana materil, DPR meminta pandangan KPK apakah sebaiknya semua delik korupsi yang ada ini juga perlu ditarik dalam KUHP.

Selain itu Komisi III DPR juga akan membahas RUU KUHP agar amandemen atau revisi atas UU KPK tidak dilakukan sebelum sinkronisasi atau harmonisasi atas UU yang lainnya selesai.



Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani

Terkait RUU atas Perubahan UU KPK, kata Arsul, dari riwayat prolegnasnya merupakan RUU Inisiatif DPR, tetapi didalam rapat antara Baleg dengan pemerintah diusulkan oleh pemerintah untuk dibahas tahun ini dengan naskah akademik yang akan disusun pemerintah.

Disamping hukum materil dan hukum formil Prolegnas juga akan memperbaharui kelembagaan penegak hukum tidak hanya KPK tetapi juga Polri dan Kejaksaan Agung. Salah satu isu didalam pembaharuan kelembagaan penegak hukum adalah persoalan kewenangan.

Ketua KPK Taufiequrachman Ruki

mengatakan, terdapat beberapa Undang-Undang (UU) yang terkait dengan pemberantasan korupsi yang perlu di amandemen dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi antara satu dan yang lainnya. Selain itu, penyesuaian dengan Ratifikasi UNCAC dan program Legislasi Nasional antara lain UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU no. 28 Tahun 1999 tentang KKN, UU No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor, dan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketua KPK menambahkan, dukungan legislasi yang dibutuhkan KPK adalah hal-hal yang perlu disinkronisasi dalam KUHP terkait masalah ketentuan hukum pidana yang seharusnya menjadi rujukan bagi seluruh ketentuan umum atas semua aturan sepanjang menyangkut hukum pidana materil.

Revisi KUHP, terutama yang menyangkut ketentuan yang terkait dengan praperadilan, diperlukan menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas ruang lingkup obyek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP. (spy,mp). Foto:

Andri/parle/od

Keberhasilan PIP Perlu Kerjasama Berbagai Pihak

Terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas Presiden Joko Widodo, Tim Kunjungan Kerja

Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya mengunjungi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

“Kunjungan kerja yang dilakukan hari ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR



Tim Kunker Komisi X DPR bersama Gubernur dan Sekda NAD

yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar,” kata Riefky saat pertemuan Tim Komisi X DPR dengan Sekretaris Daerah Aceh Dermawan dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Minggu sore (21/6/2015)

Menurut Riefky, banyak hal di lapangan yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar Program Indonesia Pintar ini berjalan dengan baik. Pertemuan yang dilakukan dengan Pemerintah Aceh serta perwakilan dari kabupaten/kota, kata politisi Partai Demokrat ini, adalah untuk mengetahui kendala, saran serta masukan terkait implementasi program Indonesia Pintar.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan DPR RI telah mengalokasikan dana bagi PIP sebesar Rp 11 triliun untuk sasaran 17,9 juta siswa di seluruh Indonesia. Tahap pertama, akan disalurkan sebanyak 4.945.650 siswa.

“Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kami terima, khusus Provinsi Aceh pada tahap pertama ini jumlah sasaran yang akan menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 205.885 siswa untuk seluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, SMU/SMK) dengan alokasi dana sebesar Rp 84.097.875.000,-,” paparnya.

Politisi Aceh ini juga mengharapkan, Kunjungan Kerja Komisi X ke Aceh ini menerima berbagai masukan dari Pemerintah Aceh. “Hal yang terpenting

bukanlah semata tentang siswa tetapi juga terkait dengan tunjangan guru, sertifikasi guru dan tunjangan guru honorer. Ia juga menegaskan, bahwa siswa penerima bantuan bukan hanya mereka yang berada di dalam sekolah tetapi juga yang berada di luar sekolah,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo menjelaskan, untuk tahun ini, Gubernur Aceh mengalokasikan biaya pendidikan kepada 110.101 anak yatim dan yatim piatu sebesar Rp 198 miliar. “Ini adalah bantuan langsung Gubernur Aceh kepada anak yatim dan yatim piatu melalui Dinas Pendidikan Aceh,” ujarnya.

Kadisdik berharap, anggaran itu dapat membantu siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga, angka anak putus sekolah di Aceh semakin kecil dan kualitas pendidikan Aceh di masa mendatang semakin baik.

Usai pertemuan dengan Sekda Aceh dan Kadis Pendidikan Aceh, Tim Kunjungan Kerja Komisi X melanjutkan Buka Puasa Bersama dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Pendopo Gubernur Aceh.

Dalam Kunjungan tersebut, Teuku Riefky Harsya didampingi antara lain Isma Yatun (F-PDIP), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Dwita Ria Gunadi (F-Gerindra), Muslim (F-PD), Teguh Juwarno (F-PAN), Laila Istiana (F-PAN), Krisna Mukti (F-PKB), Surahman Hidayat (F-PKS), dan Anwar Idris (F-PPP). (sc) foto: [suciati/parle/hr](#)

Komisi X Pantau Persiapan Pencairan Dana PIP

Program Indonesia Pintar (PIP) 2015 yang dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki kemiripan dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan sedikit perluasan dan penyempurnaan terutama dari aspek sasaran dan jangkauan.

“Karena program ini juga kelanjutan dari BSM,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam kepada wartawan usai pertemuan antara Tim Panja PIP dengan Kepala Cabang BRI, BNI, Kadisdik Pemkot/Pemkab Malang, di Kantor BRI Malang, Senin (22/6/2015).

Ia menambahkan sebagai program baru dengan sasaran 17,9 juta siswa dan anggaran sebesar Rp 7,1 Triliun, PIP dipandang masih mengandung banyak persoalan terutama dari aspek penentuan sasaran, khususnya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan juga mekanisme penyaluran yang lebih kompleks.

“Jadi tujuan Panja PIP Komisi X DPR ke Malang adalah untuk melihat langsung bagaimana persiapan pencairan KIP yang diperuntukan untuk siswa-siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam

mempunyai status miskin agar mereka dapat tepat waktu menerimanya yaitu

diharapkan bulan Juli-Agustus 2015 mendatang,” jelasnya.

Setelah itu, lanjutnya, Komisi X melihat juga pendistribusiannya di bank, karena yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kemdikbud RI yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Untuk BRI menyalurkan dananya kepada siswa SD, SMP, dan SMK. Sedangkan BNI hanya menyalurkan dananya ke SMA saja. “Ini kita lihat persiapannya,” kata Ridwan.

Saat ditanya soal data dan kendala yang dialami bank dalam menyalurkan dana KIP, politisi Golkar ini mengatakan bahwa KIP yang dikelola oleh BRI dan BNI belum ada Rp 1 pun yang cair, karena memang belum ada dananya yang masuk ke bank, yang masuk baru data. Data itu pun menurut laporan, kurang lebih 28% data yang masuk dari kurang lebih 17,9 juta siswa yang akan diberikan di seluruh Indonesia.

“Sekarang ini sedang dalam proses

pendataan di Kemdikbud, setelah data ini valid barulah dikirim ke bank untuk dicairkan dananya,” ujar Ridwan seraya menambahkan jangan sampai pada saatnya bulan Juli-Agustus 2015 ini dananya cair kemudian ada datanya yang salah yang mengakibatkan siswa tidak mendapatkannya. “Kan kasihan siswa itu tidak jadi beli pakaian seragam sekolah, sepatu atau buku dan tas sekolah,” pungkasnya. (iw)/foto: iwan armanias/parle/iv.

Program PIP Harus Tepat Waktu Dan Tepat Sasaran

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam APBN-P 2015 telah disetujui Pemerintah dan DPR adanya pos anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu pelaksanaan nawacita dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

“PIP ini adalah suatu program sebagai kelanjutan program Bantuan Siswa Miskin (BSM),” ujar Sutan Adil Hendra kepada wartawan usai meninjau Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Maghfiroh, Tiogomas, Malang, Senin (21/6/2015).

Menurut politisi Gerindra ini, PIP memiliki kemiripan dengan BSM tetapi ada jangkauan perbedaan. Kalau BSM itu khusus untuk anak-anak bersekolah tetapi dalam PIP ini untuk anak-anak yang tidak bersekolah. Artinya, anak-anak usia sekolah tapi anak itu tidak lagi bersekolah. “Komisi X akan terus melakukan pengawasan dan sejauhmana sudah dilakukan pelaksanaan



Anggota Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

PIP atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini,” tambahnya.

Ia menyarankan jangan ada lagi anak-anak yang mendapatkan KIP

karena masalah administrasi lalu dipersulit pencairan dananya. Namanya saja KIP, berarti siapa yang mendapatkan kartu itu semestinya sudah ada standar prosedur untuk bisa mencairkan dana itu.

Intinya, jelas Sutan, DPR dalam pengawasan KIP menekankan betul-betul dipastikan bahwa anak-anak yang semestinya mendapat haknya dapat dicairkan dengan mudah. Sementara anak-anak yang belum memenuhi persyaratan juga harus diberikan kemudahan-kemudahan. Pasalnya, anak-anak tersebut semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ia berharap pencairan dana KIP jangan dilakukan pada bulan Ramadhan tetapi sesudah lebaran agar tidak disalahgunakan, sesuai maksud pemberian KIP adalah tepat sasaran dan tepat waktu. (iw)/foto: iwan armanias/parle/iv.

DPR: UU Karantina Cegah Terorisme Pangan

Belum ada payung hukum yang kuat yang menjamin tingkat keamanan sumber daya alam hayati sekaligus mampu mengawal secara maksimal terhadap masuknya bahan pangan dari luar negeri termasuk juga ancaman bioterorisme yang melalui jenis makanan, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang masuk ke Indonesia.

Demikian mengemuka dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Karantina Dalam Menjamin Keamanan Pangan bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dan Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6).

“Saat ini banyak cara untuk mengganggu dan merusak suatu negara. Misalnya dengan bio terorisme, yang jenisnya banyak. Ada yang bisa menurunkan produksi ternak, tumbuh-tumbuhan, makanan dan menyebarkan berbagai jenis penyakit,” kata Herman Khaeron.

Karena itu, kata politisi Partai Demokrat tersebut, revisi UU No16 tahun 1992 tentang Karantina ini menjadi prioritas untuk diselesaikan pada sidang tahun 2015 ini, karena UU No18 tahun 2012 tentang pangan tak mampu menghadapi persoalan penyakit, keamanan, dan hama pangan. Seperti beras plastik, hama apel, hama pakan ternak dan sebagai-



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

nya. “Jadi, Badan Karantina ini menjadi pintu utama terhadap masuk dan keluarnya berbagai jenis makanan,” ujarnya.

Ia mengatakan, UU yang terkait dengan karantina tersebut antara lain, UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, UU No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, UU No 41 tahun 2014, UU No 31 tahun 2004 tentang peternakan, UU No 45 tahun 2009 dan UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem.

Ia menambahkan, UU tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan ini diharapkan melahirkan sistem perkarantina-an yang kuat, sesuai dengan perkembangan lingkungan

strategis, sejalan dengan sistem perdagangan internasional komoditas pertanian dan perikanan, dan terintegrasi dengan sistem pengawasan keamanan hayati, dan menjadi Badan Karantina yang kuat dan mandiri.

Sementara itu Banun Harpini mengatakan bioterorisme adalah terorisme yang melibatkan pelepasan disengaja atau penyebaran agen biologis. Agen ini adalah bakteri, virus, atau racun, dan mungkin dalam satu atau bentuk-dimodifikasi manusia yang terjadi secara alami. Untuk penggunaan metode ini dalam peperangan, melihat perang biologis.

“Jadi jangan main-main dengan masalah karantina. Itulah sebabnya, karantina itu harus menjadi terdepan. Tanpa pengawasan yang ketat akan merusak pertanian kita,” kata Banun.

Banun mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor unggas. Tapi begitu ada flu burung, ekspor unggas Indonesia menjadi mati. “Ya itu tadi. Banyak unggas kita mati. Lantas siapa yang menebar virus flu burung itu? Disinilah pentingnya Karantina,” paparnya.

Alasan itulah, Banun berharap, adanya undang-undang karantina sehingga lembaga yang dipimpinnya mampu mengawasi secara maksimal terhadap masuknya bahan pangan dari luar negeri. “Pengawasan keamanan pangan belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang pangan yang sudah ada. Seperti ada beras plastik yang merupakan isu keamanan pangan,” lanjut Banun. (nt/as), foto: andri/parle/hr.

Pemerintah Harus Bangun Kepercayaan Publik

Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah untuk dapat membangun kepercayaan publik, pasar, dan pelaku usaha agar pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi yang disepakati Komisi XI DPR dan Pemerintah sebesar 5,5-6 persen dapat tercapai.

Ecky optimis, target pertumbuhan ekonomi sebesar itu cukup realistis. Ia berharap, berbagai kebijakan fiskal pemerintah mampu mendorong sektor yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi itu. Apalagi ramalan ekonomi global juga semakin membaik.

“Kenapa saya optimis, karena Pemerintah kita ini sudah tahun kedua, tentunya tim ekonomi juga semakin baik juga. Juga adanya dukungan dari DPR sebagai mitra dari Pemerintah untuk mendukung kebijakan pemerintah. Namun dengan syarat, pemerintah harus membangun kepercayaan kepada publik, pasar, dan kepada pelaku usaha,” tegas Ecky ketika ditemui di

selasa-rapat dengan Pemerintah, di Gedung Nusantara I, Senin (22/06/15).

Politisi F-PKS ini menambahkan, Pemerintah juga jangan membuat kekisruhan atau gejolak baru yang bersifat kontraproduktif. Kekisruhan itu seperti statement antar Menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berbeda-beda, yang justru membuat kontroversi.

“Setiap adanya kontroversi di publik, atau statement yang membuat gejolak, maka akan terjadi sebuah ketidakpercayaan kepada pemerintah, apakah pemerintah konsen terhadap pembangunan atau tidak,” tegas Ecky.

Politisi asal Dapil Jawa Barat III ini mengingatkan, saat ini komoditas internasional yang menjadi andalan Indonesia pada 10 tahun belakangan ini sedang dipukul jatuh. Seperti harga komoditas pertambangan. Ia meminta Pemerintah untuk menggenjot sektor-sektor lain yang selama ini terabaikan.

“Misalnya sektor maritim. Kemudian, sektor manufacturing atau in-



Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam

dustri, yang sudah lama tidak menjadi fokus Pemerintah. Pemerintah harus menggenjot modal dari sektor privat, swasta, dan mengundang para investor untuk memberikan sebuah kekeluasaan untuk berinvestasi di Indonesia. Ketika investasi di sektor *manufacture* dan industri ini sudah cukup berkembang baik lokal maupun asing yang *direct investment*, pertumbuhan akan menjadi baik,” saran Ecky.

Di tahun mendatang, Ecky juga meminta agar Pemerintah dapat menciptakan stabilitas politik, dan menjaga daya beli masyarakat. Pasalnya,



ketika daya beli masyarakat turun, maka inflasi mengalami kenaikan, dan konsumsi rumah tangga menjadi

menurun.

“Imbasnya, ketika konsumsi turun, maka pertumbuhan ekonomi juga

melambat. Ini yang harus diantisipasi oleh Pemerintah,” ingat Ecky. (sf), foto : naefurodji/parle/hr.

Prestasi Indonesia di Sea Games Singapura Mengecewakan

Indonesia mendapatkan total 47 emas, 61 perak, dan 74 perunggu dalam gelaran Sea Games Singapura, 5-16 Juni 2015 lalu. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat ke lima di gelaran olahraga dua tahunan di Asia Tenggara ini. Padahal, Indonesia menargetkan minimal peringkat ke tiga. Hasil ini dinilai masih mengecewakan dan tak memenuhi harapan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana saat dihubungi Parle, baru-baru ini. Ia menegaskan, perolehan ini sangat memprihatinkan. Padahal Indonesia sudah beberapa kali mencatatkan peringkatnya sebagai juara umum.

“Sebagai negara terbesar (di Asia Tenggara), hasil ini sangat mengecewakan. Pemerintah harus evaluasi hasil Sea Games Singapura. Saat ini momentum Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melakukan evaluasi secara komprehensif tentang keolahragaan kita,” tegas Dadang.

Politisi F-Hanura ini menambahkan, selama ini pembinaan yang dilakukan oleh Kemenpora masih jauh dari

harapan. Ia menyoroti sarana prasarana dan pelatihan yang masih kurang maksimal.

“Sea Games sudah mau berlangsung, tapi sarana prasarana untuk latihan masih terlambat datang kepada atlet. Hal ini selalu terulang. Bahkan di tahun 2013 tidak ada sarpras olahraga, karena ada permasalahan teknis. Kita ingin mengejar prestasi, tapi kita tidak memaksimalkan pengadaan sarpras. Ini ironis sekali,” sesal Dadang.

Politisi asal Dapil Jawa Barat II ini menegaskan, dukungan pelatih juga mesti ditingkatkan. Ia menggarisbawahi, negara jangan tanggung-tanggung dalam memberikan fasilitas terhadap olahraga. Untuk cabang olahraga yang minim prestasi, negara harus memberikan pelatih terbaik, tentunya dengan atlet yang juga mumpuni.

“Apalagi Kemenpora ini megacu pada Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional, sehingga memiliki otoritas untuk bisa melakukan intervensi terhadap cabang olahraga. Ini menyangkut kebanggaan nasional,” tegas Dadang.



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana

Dadang berharap, Pemerintah lebih mempersiapkan turnamen internasional berikutnya, seperti Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Sea Games Malaysia 2017, Asian Games Indonesia 2018. Proses pembinaan harus dipersiapkan secara matang, dan proses pelatihan secara sistemik.

“Untuk di Asian Games atau Olimpiade, kita akan bersaing lebih berat. Tetapi tidak ada kata terlambat. Jika proses pelatihan dilakukan secara sistemik, didukung pelatih yang profesional, serta sarpras yang lengkap, hasilnya bisa kita nikmatin di tahun-tahun mendatang,” harap Dadang.

Ia juga berharap, prestasi Indonesia dapat melampaui negara-negara tetangga. Komisi X DPR akan mendorong dan membantu dari sisi anggarannya. (sf), foto : iwan armanias/parle/hr.

Pertumbuhan Ekonomi Disepakati 5,5-6 Persen

Rapat kerja Komisi XI DPR bersama dengan pemerintah menyepakati asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.

“Besaran asumsi makro indikatif yakni pertumbuhan ekonomi 5,5 - 6

persen. Inflasi di kisaran 4 persen plus minus 1 persen,” kata Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhamad saat membacakan kesimpulan hasil raker, di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senin, (22/6/15).

Politisi F-PG ini menambahkan, kesepakatan lain yang disepakati adalah nilai tukar rupiah di kisaran Rp 13.000 - Rp 13.400 per dollar AS. Kemudian tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan di kisaran 4 - 6



Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhamad

persen.

Sementara terkait Target Pembangunan, tambah Politisi asal Dapil Gorontalo ini, disepakati indikator tingkat pengangguran di kisaran 5,2 – 5,5 persen.

“Tingkat kemiskinan disepakati 9,0 -10,0 persen, dan Rasio Gini 0,39. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia di level 70,1,” tutup Fadel.

Sebelum besaran asumsi makro ini disepakati, setiap fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Secara umum, masing-masing fraksi menyetu-

jui usulan asumsi makro yang diajukan Pemerintah. meskipun juga ada fraksi yang memandang berbeda.

Menkeu menilai prediksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 yang berkisar antara 5,5 – 6 persen dinilai masih realistis. Range tersebut diperlebar akibat optimisme kondisi global, dan iklim ketidakpastian di Indonesia.

“Tahun ini penuh dengan ketidakpastian, angka 6 persen merupakan optimisme kami terhadap ekonomi global,” jelas Menkeu.

Sementara itu, Gubernur BI sejalan

dengan apa yang disampaikan Menkeu. BI memperkirakan untuk tahun 2016, nilai tukar kurs berada di range Rp13.000 – Rp13.400.

“Perkiraan ekonomi tahun 2016 masih akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2015. Dalam menjaga nilai tukar kurs, BI selalu melakukan pengendalian agar nilai tukar rupiah selalu terjaga. Hal ini dilakukan melalui bauran kebijakan stabilitas nilai tukar,” jelas Gubernur BI. (sf), foto : andri/parle/hr.

Gaji Dosen Non PNS Sedot Anggaran BOPTN

Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dengan prosentase mencapai 60-80% untuk membayar gaji tenaga pengajar (Dosen) dan pegawai tetap non PNS di Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Politeknik Manufaktur Bangka Belitung (PMBB) menjadi temuan Tim Panja BOPTN, saat Kunjungan Kerja Spesifik Di Provinsi Bangka Belitung, Senin (22/6).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Panja BOPTN Komisi X DPR RI Sohibul Iman usai memimpin pertemuan dengan Gubernur Babel, Kadisdik Provinsi Babel, Rektor UBB, Direktur PMBB dan instansi terkait di Kantor Gubernur Babel.

“Solusinya status kepegawaian ini harus jelas, diangkat menjadi PNS atau sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) sehingga status ini akan meringankan bagi PTN. Dengan status tersebut maka gajinya dapat dari anggaran rutin APBN, jadi tidak perlu lagi menggambil anggaran dari BOPTN untuk menggaji mereka,” ungkap Sohibul.

Lebih lanjut, politisi asal Dapil Garut Jawa Barat ini bisa memahami keluhan para pemangku kepentingan di PTN perihal status pegawai non PNS tersebut.

“Harapan mereka bisa diangkat menjadi PNS. Tapi kita akan lihat apakah PNS atau sebagai PPPK karena masalah ini sudah kami bahas dan sedang dirancang Perpresnya. Ada sekitar 5000 pegawai non PNS di 36 PTN baru tersebar di seluruh Indonesia. Apakah semuanya bisa dijadikan PNS atau hanya sebagian lalu sisanya menjadi PPPK,” imbuh Sohibul.

Selain masalah status pegawai non PNS, lanjut Politisi PKS ini, dirinya juga menilai BOPTN disatu sisi membantu tapi disisi yang lain juga belum memadai. Karena itu mereka (para rektor) berharap ada perubahan formula penghitungan besaran BOPTN supaya lebih bagus, dan ini juga menjadi komitmen Komisi X DPR RI.

Temuan lainnya adalah penentuan besaran BOPTN perbulan tiap PTN selama ini selalu telat, contohnya untuk Tahun 2015 baru diberitahukan pada



Ketua Tim Panja BOPTN Komisi X DPR RI Sohibul Iman

bulan Maret, bagaimana dengan bulan Januari-Februari.

“Kami berharap sebelum masuk Tahun Ajaran baru besaran BOPTN yang diterima bisa diketahui, sehingga mereka bisa melakukan perencanaan lebih bagus. Hal ini menjadi masukan positif dan akan kami tindak lanjuti dan menjadi bahan rekomendasi bagi Panja BOPTN. Antara lain agar pemerintah mengubah skema penyaluran serta mengubah status kepegawaian yg non PNS,” pungkas Sohibul. (oji)

Foto: Naefuroji/parle/od

Komisi I Uji 34 Calon Anggota LSF

Komisi I DPR RI untuk pertama kalinya melakukan uji kelayakan dan kepatutan 34 calon anggota Lembaga Sensor Film (LSF). 17 orang diantaranya akan mendapat rekomendasi dari dewan sebagai calon anggota LSF 2015-2018 yang patut dipertimbangkan

presiden.

“Iya ini pertama kali Komisi I menguji calon anggota LSF karena memang lembaga ini baru saja menjadi mitra kerja kita. Kita mencari kandidat yang punya visi terhadap tantangan film saat ini yang bukan hanya sebagai

media hiburan, tapi sudah menjadi alat bagi negara lain dalam pertarungan ideologi dan juga cyber war,” kata Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Ia menambahkan saat ini banyak



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung

pihak menyampaikan keprihatinan betapa film asing sudah sangat mendominasi di tanah air. Sejumlah negara memang menjadikan film sebagai media propaganda dan berhasil masuk ke tengah masyarakat tanpa filter dan perlahan tapi pasti mulai menanamkan ideologi baru kepada publik.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut peran DPR dalam pemilihan calon anggota LSF sesuai amanat UU no 33/2009 tentang Perfilman pasal 64 ayat 3 diharapkan membuat perubahan, menghadirkan lembaga sensor yang lebih baik.

Pada bagian lain Asril mengungkap-

kan ada masalah internal sehingga proses pemilihan anggota baru tertunda dua tahun. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan pemerintah mengambil kebijakan keanggotaan periode sebelumnya diperpanjang dua tahun.

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap 34 calon anggota LSF berlangsung selama dua hari (24-25/6). 17 kandidat diambil dari proses pencalonan yang dilaksanakan pada era Presiden SBY tetapi belum diuji di DPR sedangkan 17 kandidat lainnya merupakan usulan baru dari panitia seleksi yang dibentuk pemerintah. (iky), foto : andri/parle/hr.

Ekonomi Asia Mengalami Pemulihan Berkelanjutan



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Teguh Juwarno, Anggito Abimanyu, Armida Salsiah Alisjahbana, dan M. Wahid Supriyadi saat acara Focus Group Discussion BKSAP DPR

Sejak mengalami krisis ekonomi pada akhir 1990-an, Indonesia dan negara-negara berkembang di Asia terus mengalami pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Negara-negara ASEAN terutama, terus berbenah memperbaiki perekonomiannya untuk menghadapi kekuatan ekonomi global.

Demikian mengemuka dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang digelar Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Kamis (25/6). Acara FGD ini merupakan per-

siapan menuju penyelenggaraan sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs*, yang menempatkan DPR RI sebagai tuan rumah.

Hadir sebagai narasumber dalam FGD itu, Anggito Abimanyu, Armida Salsiah Alisjahbana, dan M. Wahid Supriyadi. Acara dimoderatori Wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno. Menurut Abimanyu, sambil terus berbenah, Indonesia harus mengambil keuntungan lebih sebagai tuan rumah sidang APA yang akan diselenggarakan pada 19-20 Agustus mendatang. Saat ini, kata Abimanyu, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya mulai memperhatikan masalah kemiskinan, MDG, dan pelestarian lingkungan.

“Namun demikian, masalah ketersediaan infrastruktur dan pra-sarana menghambat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” ungkapnya di hadapan para anggota BKSAP yang hadir. Abimanyu banyak melontarkan agenda masalah yang perlu perhatian pemerintah dan DPR. Misalnya, lanjut Abimanyu, masalah pembiayaan infrastruktur masih menjadi hambatan karena ketiadaan dana, lahan, kebijakan tarif, dan instrumen pembiayaan jangka panjang.

Teguh Juwarno saat membuka acara itu, mengatakan, BKSAP DPR harus banyak menyerap pandangan para ekonom untuk memperkaya pengetahuan dan pandangan seputar ekonomi. Penyelenggaraan APA sendiri nantinya akan mengambil tajuk “*Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity*”. (mh) foto: rizka/parle/hr

DPR Gelar Rapat Gabungan Bahas Pilkada Serentak

DPR menggelar rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III terkait

persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak 2015 di Ge-

dung DPR, Jakarta, Kamis (25/6).

Rapat yang dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan jajarannya, Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak dan jajarannya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, serta Polri diwakili oleh Kabarkham Komjen Putut Eko Bayu Seno dan As



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Pimpinan Komisi II DPR, Pimpinan Komisi III DPR sebelum rapat gabungan dengan Ketua KPU, Komisioner Bawaslu, Mendagri, Jaksa Agung, Kepolisian bahas pilkada serentak

Ops Irjen Unggung Cahyono tersebut mengagendakan terkait pengamanan dan mekanisme penyelesaian perselisihan dan sengketa terkait pilkada serentak.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang bertindak sebagai pimpinan rapat gabungan tersebut mengatakan, agenda rapat adalah membahas persiapan Pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun 2015. "Membahas pengamanan, persiapan dan mekanisme penyelesaian perselisihan terkait pilkada," kata Fahri.

Menurut Fahri, pilkada yang bakal digelar KPU akan melaksanakan pemilihan 269 kepala daerah di sembilan provinsi dengan lebih 260 kabupaten/kota. "Rapat ini juga untuk mengetahui dan mendalami prosedur agar pengamanan dan sengketa yang mungkin muncul," jelas politikus PKS itu.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman memaparkan lima syarat agar pilkada

tidak ditunda.

"Diselenggarakan atau tidaknya Pilkada serentak di 2015 tergantung lima pertanyaan ini," kata Benny K Harman.

"Apakah KPU siap? Ini harus dijawab secara benar-benar. Apakah Bawaslu siap? Apakah pengamanan siap? Apakah dana pengawasan siap? Apa dana pengamanan siap?" tanya Benny.

Selain anggaran pengamanan, yang disoroti Benny pula adalah anggaran pengawasan. Dia tidak ingin anggota pengawas Pilkada siap namun anggarannya tidak ada. "Jangan sampai Panwas belum ada uang, dibiayai yang punya uang. Pasukan-pasukan tidak dibiayai akhirnya dibiayai oleh yang punya uang," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Menurut Benny, saat ini lima pertanyaan itu belum terjawab. Dia meminta adanya rapat kerja gabungan selanjutnya setelah ini. "Perlu adanya rapat gabungan yang lebih komprehensif," ujarnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa anggaran pengamanan pilkada serentak 2015 masih bermasalah. Pasalnya tidak semua pemerintah daerah menganggarkan dana pengamanan pilkada serentak.

"Yang jadi masalah adalah anggaran pengamanan pilkada karena tidak semua daerah menganggarkan," ujar Tjahjo.

Karena itu, menurutnya rapat gabungan akan membahas salah satu masalah anggaran keamanan. Tjahjo mengungkapkan dua opsi untuk mengatasi persoalan anggaran ini.

"Apakah nanti anggaran keamanan ini, Mabes Polri mengajukan kembali ke Menteri Keuangan atau kita serahkan pada pemda setempat yang pasti ada anggarannya tetapi tidak sebesar yang diajukan," terang Tjahjo.

Sebelumnya, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno menyampaikan biaya pengamanan Pilkada Serentak ditaksir senilai Rp 1,075 triliun. Namun yang baru disetujui sebesar Rp 363 miliar sehingga kurang sebesar sekitar Rp 712 miliar.

Usai rapat, Fahri Hamzah mengatakan bahwa perlu ada konsep pencegahan persoalan yang detail dari pemerintah terkait penyelenggaraan pilkada serentak. "Kami mengusulkan pekan depan dengan persiapan mitigasi persoalan lebih detail dan apa yang muncul sebelum pilkada, persoalan apa yang muncul saat pilkada dan persoalan apa yang muncul setelah pilkada? Itu semua harus dilacak," tutupnya. (nt), foto : andri/parle/hr.



Anggota Komisi II DPR Azikin Solthan

Komisi II DPR Minta Surat Edaran KPU Dicabut

Mayoritas anggota Komisi II DPR mendesak agar Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 302/VI/KPU/2015 tentang pilkada serentak pada Desember mendatang, diharapkan untuk segera dicabut. Surat edaran KPU itu dinilai membuka "kran" dinasti politik.

Demikian mengemuka dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6) yang dipim-

pin Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman.

Tak hanya surat edaran, bahkan ada juga anggota Komisi II DPR yang meminta Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 direvisi. PKPU ini lah yang menjadi pangkal muasal terbitnya SE nomor 302/VI/KPU/2015. Sebelumnya, KPU menjelaskan bahwa surat edaran tersebut muncul sebagai penjelasan peraturan KPU (PKPU) No 9 tentang



pencalonan.

“Kita mau tinjau ulang surat edaran dan seiring itu kita lakukan revisi PKPU No 9 tentang pencalonan,” kata Rambe Kamarulzaman.

Namun, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan langsung meminta surat edaran tersebut dicabut tanpa revisi PKPU No 9 tahun 2015. “Solusinya tegas, langsung cabut surat edaran. Ketua KPU jangan berpolemik,” kata Arteria.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Rufinus Hotmaulana Hutauruk juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, hanya ada satu solusi dari permasalahan petahana saat ini yaitu surat edaran KPU harus dicabut.

Sementara Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azikin Solthan surat edaran KPU tidak diperlukan lantaran sedang dibahas di MK. “Jangan mendahului MK,” ujarnya.

Ia menilai bahwa KPU telah diintervensi oleh pihak-pihak yang menginginkan untuk pilkada serentak ini dimundurkan waktu pelaksanaannya.

“Apa urgensinya audit BPK digembarkan? Itu kan hal berbeda. Apalagi kami di Komisi II punya pertanyaan juga ke BPK, kenapa cuma KPU yang diaudit dan dihebohkan seperti ini?” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengatakan apabila surat edaran dicabut, masih ada PKPU yang mendefinisikan petahana sebagai pejabat eksisting yang sedang menjabat. Oleh karena itu, PKPU sebagai sumbernya harus direvisi pula.

“Surat edaran tidak cukup kuat rujukannya. Saya usulkan selain revisi surat edaran tapi juga revisi PKPU, kalau mungkin revisi UU. Yang paling mungkin revisi surat edaran dan PKPU. Kapan? Apa sekarang atau tunggu putusan MK?” ungkap Riza.

Sementara itu Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan surat edaran tersebut dibuat berdasarkan peraturan KPU khusus untuk pemilihan kepala daerah 2015.

Pihaknya enggan disalahkan perihal tersebut. Menurutnya, surat edaran

tersebut dikeluarkan karena ada daerah yang ingin mengetahui penjelasan apa yang dimaksud dengan petahana.

“Jika nyatanya salah, mengapa saat PKPU ditetapkan tak ada kritik. KPU hanya menjelaskan apa yang ingin kita jelaskan. Ini bukan norma baru yang kami buat,” ujar Husni.

Saat itu, setelah berkonsultasi dengan DPR, akhirnya KPU diminta membuat pengertian sesuai dengan yang ada di UU. Pengertian petahana yang dirujuk dalam UU adalah mereka yang sedang menjabat “Jadi jika ada masa kepengurusannya jatuh satu hari sebelum pencalonan, bukan petahana lagi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Husni seandainya surat edaran tersebut mau dicabut maka pengertiannya harus diubah. “Kalau mau dicabut berarti peraturan mengenai pengertian petahana harus dilakukan pendefinisian ulang,” kata Husni. (nt), foto : riska ari-
nindya/parle/hr.

DPR Akan Pertimbangkan RS Pirngadi Menjadi RS Tipe A



Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz

Komisi IX akan segera mempertimbangkan permintaan dari jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi, untuk meningkatkan menjadi RS Tipe A, atau RS Pusat. Saat ini, RS yang telah berdiri dari tahun 1928 ini masih berstatus RS Tipe B.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur, sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR ke RS Pirngadi, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (15/06/15).

“Kita perlu pertimbangkan untuk merubah RS Pirngadi menjadi RS Pusat. Supaya jadi besar dan pelayanan kesehatan menjadi maksimal. Ini perlu dikaji betul, untuk menjadi-

kan RS Pirngadi menjadi RS nasional,” kata Politisi F-PAN ini.

Namun Politisi asal Dapil Kepulauan Riau ini mengingatkan kepada manajemen RS Pirngadi untuk agar dapat membuat perencanaan yang detail dan terkonsep, sehingga RS Pirngadi dapat semakin maskimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dukungan juga datang dari Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz. Ia mengaku memberikan dukungan sepenuhnya jika ingin menjadikan RS Pirngadi menjadi RS Tipe A. Apalagi, RS ini setidaknya melayani lebih dari 1000 pasien rawat jalan harinya, sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kami sepakat, untuk mendukung keinginan pihak RS agar ditingkatkan statusnya menjadi Tipe A, dan menjadi rujukan nasional. Saya sebagai orang Medan, yang memang tahu persis bagaimana kiprah RS ini, tentu saja sangat mendukung. Ini bukan hanya RS pendidikan, tapi juga RS perjuangan,” kata Politisi F-PPP ini.

Untuk mendukung operasional RS yang juga menjadi RS pendidikan ini, ia meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian kepada sarana prasarana terkait peralatan medis yang dinilai belum lengkap dan belum pernah diperbarui.

“DPR juga punya komitmen untuk mendorong agar alat-alat yang dibutuhkan RS segera disiapkan. Mengingat juga anggaran kesehatan untuk tahun mendatang cukup signifikan,” imbuh Politisi asal Dapil Banten ini.

Namun, hal berbeda disampaikan Anggota Komisi IX Okky

Asokawati. Ia menyatakan, permintaan untuk menjadi RS Pirngadi menjadi RS Tipe A perlu dikaji secara mendalam. Perlu dilakukan *baseline study* mengenai kondisi RS Pirngadi secara menyeluruh.

“Untuk meningkatkan type RS itu perlu ada *baseline study*, tidak bisa secepat itu kita memutuskan. Memang semangatnya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Sumut. Tapi jangan sampai karena nafsunya ingin meningkatkan pelayanan kesehatan, kemudian Tipe RS ditingkatkan, tapi kompetensi dari tenaga medisnya belum siap, dan peralatan medis juga belum me-

madai. Nanti malah menjadi bumerang bagi Kementerian Kesehatan dan RS sendiri,” papar Okky.

Politisi F-PPP ini mengingatkan Pemerintah Daerah terkait mapping pelayanan kesehatan di Sumatera Utara. Apalagi di Sumut juga sudah ada RS Adam Malik.

“Perlu kita lihat juga, bagaimana dengan potret kesehatan masyarakat Sumut. Harus dipertimbangkan bukan hanya dari peralatannya saja, tapi juga tenaga kesehatannya,” ingat Politisi asal Dapil DKI Jakarta ini. (sf) Foto: Sofyan/parle/od

Implementasi UP2DP Perpendek Disparitas Antar Wilayah

Ketua Panja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilih (UP2DP) Totok Daryanto mengatakan, implementasi UP2DP sudah seharusnya tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan mampu memperkuat representasi anggota DPR RI di daerah pemilihannya.

“Meskipun demikian yang perlu kita perhatikan bersama adalah UP2DP harus mampu memperpendek disparitas baik antara wilayah maupun antar kelompok pendapatan masyarakat,” jelasnya kepada Parlemen, baru-baru ini.

Menurutnya, praktik-praktik yang ti-



Ketua Panja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilih (UP2DP) Totok Daryanto

tidak sesuai dengan tata kelola keuangan negara dan penegakan hukum

seperti duplikasi, program fiktif dan *kick back* yang selama ini ditakutkan masyarakat harus dihindari.

“Hal ini menjadi penting agar roh tujuan mulai dari program pembangunan daerah pemilihan ini dapat terwujud dan mampu meningkatkan kredibilitas DPR RI,” tandasnya.

Usulan program pembangunan daerah pemilihan dapat berasal dari inisiatif sendiri, Pemda, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang nantinya akan diintegrasikan kedalam program pembangunan nasional dalam APBN. (Sugeng) Foto: Jaka Nugraha/parle/od

Rekayasa Lalu Lintas Tersistematis Diperlukan Hadapi Masa Lebaran



Ketua Komisi V DPR Fari Djemi Francis berdialog dengan Menhub

Dalam menghadapi lebaran 2015 ini, pemerintah diminta melakukan rekayasa lalu lintas dan *traffic management* yang tersistematis sehingga tidak terulang kemacetan yang luar biasa di jalan Pantura.

“Sampai sekarang kita tidak pernah melakukan rekayasa lalu lintas padahal rekayasa lalu lintas ini menjadi salah satu alternatif atasi kemacetan,” jelasnya saat Raker Komisi VII DPR dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, di Gedung Nusantara, Rabu Sore, (24/6).

Selama ini, lanjutnya, kepolisian hanya memindahkan jalur yang padat ke jalur alternatif. “Pada tahun 2007, saya pernah merasakan terjebak dan tidak bergerak saat arus mudik karena adanya pengalihan Korlantas yang salah,” paparnya.

Menurutnya, persoalan *traffic management* sangat di perlukan dalam menghadapi kemacetan menyambut lebaran nanti. “Misalnya saja polisi dilapangan tidak pernah menergur mobil yang melampaui batas kecepatan di tol, karena tol itu didesain adanya kecepatan minimal dan maksimal,” tandasnya.

Dia menambahkan, seperti Tol Cipali jika tidak diatur traf-



fic manajemennya hanya akan memindahkan kemacetan di Pantura ke jalur sini. “Pengelola jalan kerap tidak mencantumkan di pintu gerbang rambu-rambu lalu lintasnya, artinya tol belum selesai 100 persen,” paparnya.

Dia mengatakan, kecelakaan yang terjadi dikarenakan kerap kendaraan melampaui kecepatan yang disarankan

serta prasarana rambu, “Kita akui memang masih kurang rambu, perlindungan keselamatan memang belum maksimal ada beberapa titik, seperti pagar keamanan belum ada, sehingga memungkinkan binatang apa saja bisa masuk. Persoalan kecelakaan di Cipali karena kita lalai dalam *traffic management*,” jelasnya. (Si), foto : *riska arinindya/parle/hr*.

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan Amanat UU MD3



Wakil Ketua Tim UP2DP dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD 3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebagai upaya untuk mendekatkan anggota DPR RI dengan masyarakat. Program itu sesuai dengan usulan atau program yang disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPR RI, di mana setiap anggota tidak memegang dana untuk pembangunan itu sendiri.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Tim UP2DP dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun dalam diskusi dialektika demokrasi “Pro-Kontra Dana Aspirasi UP2DP” bersama anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Rakhmat Bagdja, dan pengamat politik dari Universitas Hasanudin Makasar Adi Suryadi Cula di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (18/6).

“Selain usulan masyarakat, juga usulan camat, bupati dan gubernur bisa disampaikan melalui UP2DP ini, karena dalam pertarungan Pilkada, daerah calon kepala daerah yang kalah biasanya tidak dibangun oleh pemenang Pilkada. Tapi, usulan ini terserah pemerintah untuk menindaklanjuti, karena anggota DPR bukan pengguna kuasa anggaran,” kata Misbakhun.

Berbarengan dengan itu ada indeks netralitas kesenjangan berdasarkan jumlah penduduk, bukan luas wilayah. Sesuai pasal 23 UUD NRI 1945 kata Misbakhun, seluruh penggunaan anggaran tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Program ini untuk memperkuat keterwakilan di Dapil masing-masing sekaligus untuk membangun transparansi dan akuntabilitas anggota DPR RI,” ujarnya.

Sementara itu, Effendi Simbolon mempersoalkan nomenklatur dana aspirasi yang bisa menimbulkan berbagai interpretasi, apalagi dalam bentuk uang Rp 20 miliar setiap anggota DPR. Padahal sudah ada dana tunjangan reses Rp

150 juta/bulan.

“Jadi, sejak awal saya menolak program ini karena tak ada dalam Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) anggota DPR RI mengingat DPR bukan eksekutor. Di mana sebanyak 560 anggota DPR X Rp 20 M X 5 tahun = Rp 12 triliun. Lalu, apa uang Rp12 triliun itu sudah menjadi kewenangan pemerintah dan juga dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrebang)?” tegas Effendi Simbolon.

Kalau berurusan dengan rakyat di Dapil lanjut Effendi Simbolon, DPR tinggal mengawasi pelaksanaan anggaran pembangunan yang sudah dialokasikan kepada Musrebang. “Kan ada dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana transfer daerah, yang jumlahnya ratusan miliar rupiah. Tapi, kalau hanya sebagai usulan, tak masalah. Jadi, saya percaya pada tim UP2DP sepanjang bisa mengakomodir berbagai kekhawatiran terhadap dana aspirasi yang bisa diselewengkan untuk pencitraan politik. Namun, kalau tidak bisa, ya tidak usah dipaksakan,” pungkasnya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Rakhmat Bagdja menegaskan jika program anggaran dan pengawasan antara DPR dan pemerintah harus sama-sama kuat. Sebab, dalam kasus pembangunan Universitas Andalas Sumatera Barat, yang rusak akibat gempa, di mana anggaran pembangunannya masih kurang Rp 80 miliar, sampai saat ini terbukti tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, sehingga macet.

“Nah, dalam kasus seperti inilah DPR RI bisa mendesak pemerintah merealisasikan pembangunan kampus itu dan itu bisa dialokasikan melalui program UP2DP ini,” tegas Rakhmat.

Hanya saja kemudian menjadi masalah kalau nomenklaturnya dana aspirasi, yang seharusnya mengawal-mengawasi dana aspirasi yang dijalankan oleh pemerintah. “Usulan itu bagus dan tidak melanggar *check and balances*, maka fungsi DPR harus diperkuat dalam mengawasi pelaksanaan APBN Rp 2.400 triliun. Apalagi KPK makin hancur,” ujarnya.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Hasanudin Makasar Adi Suryadi Cula menilai program UP2DP itu pragmatis, sehingga tak terlihat urgensinya bagi fungsi DPR sendiri, di tengah citra DPR masih buruk. “Saya khawatir implementasi dari program ini untuk menangani Rp 20 M per anggota? Mafia baru bisa muncul dalam pengelolaan anggaran ini. Untuk itu, ide yang bagus ini mekanismenya perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai kecurigaan masyarakat,” pungkasnya. (sc)

Foto: *Andri/parle/od*

Soal KaBIN, Komisi I Perhatikan Masukan Publik

Komisi I DPR memberikan ruang se-luas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait calon Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), Letjen (Purn) TNI Sutiyoso yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Seluruh masukan tersebut termasuk unjuk rasa penolakan, akan menjadi bagian pertimbangan DPR kepada presiden.

“Iya kita mencermati ada unjuk rasa mahasiswa, masyarakat yang menyampaikan penolakan terhadap Bang Yos ini. Apapun masukannya tentu akan jadi masukan bagi kita di Komisi I sebelum nantinya memberikan pertimbangan kepada presiden,” kata anggota Komisi I Elnino M. Husein Mohi di Gedung DPR, Senayan, Senin (22/6).

Ketika ditanya tentang sikap politiknya, wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo ini mengaku belum

dapat menyampaikannya sebelum proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap kandidat yang dilaksanakan dalam waktu dekat.

Beberapa waktu lalu mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa menolak Sutiyoso menjadi Kepala BIN. Mereka menyerukan agar DPR mengembalikan nama calon kepala BIN kepada presiden dan kemudian diganti nama lain yang bersih dari permasalahan HAM.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menjelaskan sesuai UU no.17/2011 tentang Intelijen Negara pasal 36, DPR hanya bertugas untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan Kepala BIN. Menurutnya presiden bisa saja menetapkan keputusan tidak sesuai pertimbangan DPR.



Anggota Komisi I Elnino M. Husein Mohi

“Jadi namanya pertimbangan, tergantung presiden mau dipakai atau tidak. Untuk KaBin sama seperti pemilihan duta besar, DPR hanya bertugas memberi pertimbangan. Pada periode lalu kami mengidentifikasi ada 11 duta besar tidak layak kirim tetapi presiden waktu itu era SBY tetap mengirim yang bersangkutan,” kata dia. (iky), foto : andri/parle/hr.



Anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra

Komisi I DPR RI meminta pemerintah menetapkan *road map* yang jelas dalam menuntaskan sejumlah permasalahan yang masih terjadi di provinsi paling timur Indonesia yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. *Road map* tersebut memuat rencana kerja yang jelas dan rinci sehingga kebijakan dimasa datang bukan lagi bersifat *ad hoc*.

Penuntasan Masalah Papua Perlu Road Map

“Itu yang kita minta kepada pemerintah untuk memiliki *road map* penyelesaian papua yang berisi konsep yang integral dan komprehensif dengan memperhatikan berbagai pendekatan yang menyeluruh,” kata anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra usai rapat kerja dengan Menlu, Panglima TNI dan Kepala BIN di Gedung DPR, Senayan, Senin (22/6).

Rapat tertutup ini paparnya sesuai agenda membahas permohonan pemerintah yang meminta pertimbangan mengenai rencana pemberian Amnesti dan Abolisi untuk sejumlah narapidana politik yang berada di Papua. Namun lanjut politisi Fraksi Partai Nasdem ini pembicaraan kemudian mengerucut pada penekanan pentingnya *road map* yang perlu disampaikan kepada DPR.

Bicara pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menjelaskan dalam rapat tersebut

sejumlah anggota Komisi I menyampaikan keberatannya atas keputusan pemerintah yang sebelumnya telah memberikan pengampunan kepada lima tapol Papua.

“Pada intinya Komisi I tidak mendukung pemberian abolisi bagi tahanan politik ini, tetapi yang sudah ya sudah ada 5 orang yang sudah diberikan. Ke depan presiden perlu mendapat pertimbangan DPR soal ini sebelum membuat keputusan,” tekannya.

Selanjutnya menurut wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta III pembicaraan tentang rencana pemberian Amnesti dan Abolisi ini akan dilanjutkan dalam rapat gabungan dengan Komisi III. “Iya sebelum rapat gabungan kita perlu mendengar masukan dari mitra kerja Komisi I Menlu, Panglima TNI dan KaBin,” demikian Tanto. (iky), foto : iwan armanias/parle/hr.



Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg

Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra Ramson Siagian mendesak pemerintah menyusun kebijakan khusus terkait distribusi tabung gas elpiji 3 kg.

“Dari hasil kunjungan Dapil, kami temui banyak masyarakat yang tidak punya hak tapi mereka bisa membeli gas 3 kg, sementara yang punya hak kadang-kadang kesulitan dan langka memperoleh gas,” ujarnya saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung DPR, Senin, (22/6).

Menurutnya, jika tidak ada sistem monitoring terkait distribusi gas 3 kg ini tentunya akan memberatkan rakyat kecil. “Perlu adanya inovasi bagi pengguna gas 3 kg, agar yang mampu tidak bisa membeli gas 3 kg tersebut,

jadi perlu buat sistem monitoring yang jelas,” jelasnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dari Partai Nasdem menilai, selama ini Pulau Sumbawa selalu dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, gas di daerah tersebut sangat sulit dan langka diperoleh.

“Masyarakat merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat bahkan sampai saat ini tidak ada gas di pulau Sumbawa, karena itu kita minta dipercepat realisasinya dan dipersiapkan infrastrukturnya di lapangan khusus distribusi elpiji 3 kg,” jelasnya.

Selama ini, paparnya, Pulau Sumbawa telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Misalnya, saja produksi Bawang di Bima sangat luar



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi

biasa, begitu juga produksi jagung di Dompu. “Kita minta dipercepat konversi minyak tanah ke elpiji, selain itu perlu dikurangi penyelundupan minyak tanah dari Pulau Sumbawa ke Lombok,” paparnya. (Sugeng), foto : naefuroji/parle/hr

Raker Komisi VIII Dengan Menteri Agama Bahas Kinerja Ditunda



Ketua Komisi VIII Saleh Partaonon Daulay

Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI batal dilaksanakan dikarenakan persoalan teknis. Sedianya Raker tersebut membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015 dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2016.

Ketua Komisi VIII Saleh Partaonon Daulay mengatakan, penundaan Rapat hari ini disebabkan persoalan teknis, karena ada beberapa hal data yang diminta oleh Komisi VIII untuk disiapkan sebelum rapat, ternyata pihak kementerian agama masih memerlukan waktu 1-2 hari ini untuk menyiapkan itu.

“Ini persoalan teknis saja, karena bagaimana kita (Komisi

VIII) mau mengevaluasi program kalau data yang diberikan tidak lengkap. Jadi kita mau minta data yang lengkap, supaya kita bisa melakukan upaya evaluasi secara komprehensif. Mungkin minggu depan akan kita lakukan rapat itu,” katanya, kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senin, (22/6).

Sampai sejauh ini, politisi Partai Amanat Nasional mengatakan, untuk tahun 2015 belum dapat memberikan penilaian secara utuh terhadap kinerja Kementerian Agama, karena ada banyak program kementerian ini yang belum berjalan. Termasuk diantaranya soal bantuan-bantuan sosial seperti dana BOS yang sampai saat ini belum bisa disalurkan oleh Kementerian Agama.

Menurutnya, persoalan bukan ada di Kementerian Agama, tetapi ada pada Kementerian Keuangan. Yang merubah akun 57 menjadi akun 52 untuk menyalurkan bantuan dana BOS seperti itu. Otomatis dalam program ini tentunya Kementerian Agama belum bisa berbuat banyak.

“Mereka (Kementerian Agama) sampai hari ini sedang melakukan upaya-upaya perbaikan sehingga proses pencairan anggaran tersebut bisa dilakukan dalam waktu dekat ini,” ungkap Saleh.

Selanjutnya, Saleh menilai terhadap pelaksanaan haji. Sejauh ini, dia melihat penyelenggaraan ibadah haji sudah baik. Ada beberapa program yang sudah mereka kerjakan yaitu tentang pelatihan-pelatihan yang terkait petugas haji yang akan diberangkatkan ke Saudi dalam rangka melayani jamaah haji Indonesia.

“Hal ini Sudah berlangsung, tinggal kita lihat imlementasinya, petugas tersebut melayani jamaah haji sesuai

dengan yang kita harapkan. Tapi saat ini kita belum bisa mengetahui secara persis tentang pemondokan yang ada di Saudi dan kebutuhan transportasi lokal yang dibutuhkan jamaah,” paparnya,

Lebih lanjut terkait Dirjen Bimas Islam, Saleh, menilai sudah cukup bagus, mereka melakukan Sidang Isbat secara tertutup. Menurutnya Sidang Isbat itu maknanya luar biasa

bagus untuk memenuhi prinsip ukhuwah islamiyah.

“Dengan tertutup berarti tidak ada perdebatan di luar, yang ada adalah perdebatan internal. Jadi masyarakat tidak diikutkan untuk ikut membahas soal perbedaan atau khilafah yang terkait penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal nanti. Ini tentunya bisa dipertahankan dan cukup bagus,” ungkapnya. (as), foto : andri/parle/hr.

Pemerintah Dituntut Kerja Keras Capai Target *Lifting Gas*



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan, pemerintah harus kerja keras untuk mencapai target *lifting gas* yang telah disepakati dengan asumsi batas bawah 1.100 BOEPD (barel setara minyak per hari) dan batas atas 1.300 BOEPD.

“Pemerintah harus kerja keras untuk mencapai target ini, caranya mungkin perlu merubah distribusi terbuka menjadi tertutup dari yang semua punya hak menjadi terbatas, artinya dulu semua orang memakai gas baik pemilik apartemen mewah maupun restoran bebas membeli 3 kg,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Senin, (22/6).

Menurutnya, persoalan gas ini lebih banyak faktor komersial, pasalnya ada 6 kargo yang tidak bisa dikirim ke

negara tujuan. “Masalah gas ini bukan produksi, kita intinya ingin pemerintah kerja keras sehingga serapan maksimal, memang sekarang ini *oversupply* tetapi kita tetap meminta pemerintah untuk meningkatkan komitmen gas yang kita sepakati,” paparnya.

Sementara, anggota Komisi VII DPR Iskan Qolba Lubis mengatakan, sistem subsidi 3 kg itu salah sasaran harusnya yang disubsidi orang miskin bukan tabung gas seperti sekarang. “Itu membuktikan sasaran subsidi tidak tepat seharusnya menggunakan sistem tertutup dan yang disubsidi tabung gas itu yang salah harus ditertibkan, ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran negara,” tegas anggota DPR dari Fraksi PKS. (Sugeng), foto : jaka/parle/hr.

Tidak Ada Upaya Pelemahan KPU

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menegaskan, tidak ada upaya pelemahan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Tidak ada upaya pelemahan terhadap KPU. Justru penguatan kepada KPU. Konsen kita adalah penguatan kepada demokrasi. Demokrasi pilkada serentak tahun 2015 dan 2017, serta pemilihan umum serentak tahun 2019 itu harus baik,” tandasnya menjawab pers sebelum mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senin (22/6).

Menurut Lukman, konsen DPR khususnya Komisi II agar pilkada dan pemilu mendatang bisa berlangsung dengan baik. “Nah pelaksanaan pesta demokrasi itu baru bisa baik, kalau pelaksanaan pemilunya juga baik,” kat-

anya lagi.

Pernyataan politisi PKB ini dikatakannya menanggapi pernyataan Ketua DPD Irman Gusman yang menduga ada upaya melemahkan KPU sehingga pelaksanaan pilkada serentak tahun ini tidak bisa digelar. Dugaan ini muncul lantaran hasil pemeriksaan BPK disinyalir sengaja didorong ke arah penundaan pilkada tersebut yang diungkapkan dalam diskusi bertajuk “Lika-liku Pilkada 2015”, Minggu lalu.

Pimpinan Komisi II ini menyatakan, publik menyaksikan ada pertentangan pendapat antara Komisi II dengan KPU. Tetapi ditegaskan, ada atau tidak ada hubungannya, ini menjadi penting dari sisi fungsi dan tugas DPR untuk melakukan pengawasan, apalagi temuan BPK tidak menyangkut Komisi



Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy

II dan KPU.

Temuan BPK itu lanjut Lukman Edy, sifatnya independen dan lembaga itu bekerja dengan mekanisme sendiri dan memang sudah jadwalnya BPK melaporkan kepada Rapat Paripurna DPR dan seharusnya seluruh Komisi-komisi DPR menindaklanjuti laporan BPK itu. Apalagi berdasarkan konstitusi, semua hasil pemeriksaan BPK harus diserahkan kepada DPR dan DPD. (mp), foto : rizka arinindya/parle/hr.



Harus Bangun Kemitraan Untuk Tingkatkan Produksi Gula



Anggota Komisi VI DPR Dwie Aroem Hadiati

Amanat UU No.39/2014 tentang Perkebunan yang mengatur bahwa industri gula harus memiliki lahan tebu sendiri, adalah sejalan dengan pemikiran Komisi VI DPR untuk melindungi petani tebu. Persoalannya dari 11 pabrik gula (PG) swasta yang ada di Lampung belum semuanya mematuhi ketentuan tersebut.

“Karena itu kami mendesak UU tersebut harus dilaksanakan dengan konsisten. Pemerintah harus tegas menjalankan amanat UU tersebut dan DPR juga menegakkan fungsi pengawasannya,” ungkap anggota Komisi VI DPR Dwie Aroem Hadiati di sela-sela kunker spesifik di Lampung, Selasa (16/6).

Menurut politisi FPG ini, untuk Propinsi Lampung, lahan di atas 10 ribu ha sudah sangat sulit didapatkan, sehingga PG harus membangun kemitraan dengan petani tebu atau memberdayakan masyarakat untuk menanam tebu. “Jadi memang harus ada kemitraan antara pemilik PG yang

tidak memiliki lahan yang cukup dengan petani tebu dan masyarakat untuk meningkatkan produksi gula nasional,” ungkapnya lagi.

Secara tegas Sekretaris Pemprop Lampung Arinal Dju-naedi telah mengingatkan bahwa lahan di atas 10 ribu ha sudah tidak ada lagi sehingga harus bermitra dengan masyarakat. “Pengusaha gula rafinasi, kami bisa membantu lahan 1.000 ha, tetapi kalau di atas 10 ribu ha jangan harap kecuali bermitra dengan masyarakat atau kawasan hutan,” ungkap Arinal tegas.

Dwie Aroem mendukung Pemprop Lampung agar pengusaha gula rafinasi untuk menyetop impor gula mentah saat petani tebu panen raya pada April-September meski masalah ini terkait kebijakan Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan BKPM. “Komisi VI setuju penghentian impor gula mentah tersebut sehingga petani tebu khususnya di Lampung akan terlindungi,” ujarnya.

Terkait dengan kondisi tersebut, dia mengaku tekad mewujudkan swasembada gula masih sulit dicapai, sebab masih banyak hal yang harus dibenahi terkait dengan tata niaga gula. Selain itu harus ada *road map* yang jelas antara kementerian terkait baik perindustrian, perdagangan dan BUMN. “Selama belum ada *road map* yang jelas, bagaimana kita mau mencapai swasembada gula dalam 5 tahun ini. Tapi UU No.39/2014 sudah mengarah terhadap perlindungan petani tebu. Ini perlu diapresiasi,” katanya.

la menambahkan, salah satu tujuan kunker ke Lampung terkait masalah gula adalah mengevaluasi apakah UU No 39/2014 tersebut sudah dilaksanakan atau belum dan ingin mengetahui di mana masalahnya untuk selanjutnya dibahas di tingkat pusat. Satu lagi apakah gula rafinasi di Lampung ada rembesan keluar dari ijin impor yang diberikan. “Komisi VI juga mesti tahu masalah ini sehingga tidak merugikan masyarakat,” ungkap Dwie Aroem menjelaskan. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.

Implementasi BPJS Masih Bermasalah

Pelaksanaan program BPJS Kesehatan dinilai masih banyak mengalami masalah. Permasalahan dimulai dari hulu, sehingga pelaksanaan di hilir pun pasti akan menemui kendala. BPJS dan Kementerian Kesehatan dianggap belum dapat berkomunikasi dengan baik.

Demikian terungkap saat pertemuan antara Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR dengan jajaran manajemen RS Pirngadi, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Perwakilan Kemenkes, serta stakeholder bidang kesehatan, di RS Pirngadi, Medan, Provinsi Sumut, Senin (15/05).



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

“Kemenkes sebagai regulatornya atau pembuat regulasi, sementara BPJS sebagai operatornya. Sayangnya, antara regulator dan operator ini tidak mempunyai komunikasi yang bagus. Tidak inline,” tegas Anggota Komisi IX Okky Asokawati, usai pertemuan.

Bukan hanya di RS Pirngadi, tambah Politisi F-PPP ini, ia juga sering menemukan temuan dan mendapat keluhan mengenai pelaksanaan BPJS. Bahkan, sebelum BPJS berlaku per 1 Januari 2014, permasalahan juga tercium dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

“Saya ingat sekali ketika BPJS mau

diberlakukan, hutang Jamkesmas kepada rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu masih banyak. Kami teriak-teriak kepada Menkes. Jika program BPJS jalan, sementara pemerintah belum membayar hutang dari program Jamkesmas, maka hutang akan semakin besar,” papar Okky.

Tak heran, Politisi asal Dapil DKI Jakarta ini memperkirakan pelaksanaan BPJS akan menemui masalah. Okky menilai, Kemenkes dan BPJS belum melakukan perbaikan dalam hal manajemen. Terutama, masalah dalam pembayaran klaim kepada RS atau pelayanan kesehatan, yg dirasa masih tidak sesuai dengan jumlah klaimnya.

“Kalau ada yang mengatakan bahwa BPJS bisa bangkrut, menurut saya tidak akan mungkin. Justru yang bisa bangkrut malah RS atau pelayanan kesehatan. BPJS itu mengambil uang dari pemberi iuran, terus uang itu untuk dibayarkan kembali kepada RS. Justru malah yang dikhawatirkan akan mengalami kerugian adalah pelayanan-

pelayanan kesehatan ini,” tegas Okky.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjitaning (F-PDI Perjuangan) menyoroti jumlah kamar kelas III di RS, baik negeri maupun swasta yang belum memenuhi dari sisi jumlahnya. Ia menyarankan agar seluruh kamar kelas III dibayar oleh Pemerintah.

“Sebaiknya, kelas III di RS ini dibeli saja oleh Negara, baik negeri atau swasta. karena memang kita butuh kamar kelas III di RS. Karena perbandingan rasionya 1:1000, jika jumlah warga Indonesia 240 juta jiwa, berarti kita harus punya minimal 240 ribu kamar kelas III di RS,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Barat ini.

Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP) meminta seluruh permasalahan teknis BPJS Kesehatan untuk terus dibanahi. Sosialisasi ke tengah masyarakat juga perlu ditingkatkan.

“Sosialisasi kepesertaan juga penting. Masyarakat jangan menunggu sakit

dahulu baru mendaftar. Karena harus daftar dulu, baru aktifasi seminggu kemudian. Sistem rujukan juga perlu disosialisasikan. Sehingga masyarakat tidak selalu harus langsung ke RS besar, mereka harus mulai dari puskesmas dulu,” ingat Politisi asal Dapil Banten ini.

Sementara sebelumnya, Direktur Utama RS Pirngadi, Edwin Effendi mengatakan permasalahan BPJS Kesehatan selama ini meliputi administrasi, dimana banyak masyarakat belum memahami proses administrasi. Terkait kepesertaan, masih banyak masyarakat yang masuk RS tidak mempunyai kartu JKN.

“Masalah pelayanan, banyak permintaan Kelas I dari pasien, tapi fasilitas terbatas. Banyak sarana prasarana dan obat yang belum lengkap. Masalah klaim, dimana klaim tidak sesuai dengan pelayanan. RS merasa dirugikan,” papar Edwin. (sf) Foto: Sofyan/parle/od

Temuan BPK Tak Bisa Tunda Pilkada Serentak



Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzaman

Menyusul ramainya temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPU, pelaksanaan Pilkada serentak tetap harus berjalan. Temuan itu tidak bisa menunda Pilkada serentak yang rencananya digelar pada De-

seMBER 2015.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamaruzaman menegaskan hal tersebut sesaat sebelum memimpin rapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Senin (22/6). “Audit tidak ada hubungannya

dengan Pilkada. Audit yang disampaikan baru 34 persen. Dan KPU sudah menjawab, bahkan menindaklanjuti. Kita sepakat bahwa Pilkada serentak tetap jalan,” tandas Rambe.

Seperti diketahui, ada temuan kerugian negara dari hasil audit BPK pada penyelenggaraan pemilu 2014. Kerugian tersebut sebesar Rp 34,3 miliar. Temuan ini menjadi pusat perhatian publik dan sangat mengganggu persiapan KPU dalam menggelar pilkada serentak untuk pertama kalinya di Indonesia.

Rambe sendiri sekali lagi menyatakan, Pilkada tidak usah ditunda pelaksanaannya. Temuan BPK itu merupakan masalah sendiri yang nanti akan dijawab oleh KPU dalam rapat dengan Komisi II. Politisi Partai Golkar tersebut, mengungkapkan, tidak ada yang ditutup-tutupi dari hasil temuan tersebut. Komisi II juga ingin transparan kepada publik. “Kita mau tunjukkan ke masyarakat bahwa KPU kita seperti ini. Rapat terbuka tidak ada yang ditutupi, apalagi ini bulan puasa,” kilahnya. (mh), foto : ray/parle/ry

BKSAP DPR dan Bappenas Sepakat Bentuk Komite Khusus SDGs



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf

Bappenas dan DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menyepakati akan berkoordinasi dan bersinergi lebih erat dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-kerangka pembangunan global baru yang akan menggantikan MDGs pada 2015 ini. Hal itu akan diperkuat dengan pembentukan sebuah komite khusus tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Demikian salah satu hasil kesepakatan rapat pendalaman mengenai MDGs dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Ketua Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, yang digelar di Kantor Bappenas, baru-baru ini. Komite khusus tersebut terdiri dari Bappenas, Kementerian terkait lainnya, DPR dan juga masyarakat sipil.

Pada rapat tersebut, Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menekankan bahwa keterlibatan DPR adalah penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan global. Panja mencatat bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya dari pelaksanaan MDGs, keterlibatan DPR tidak penuh dalam konteks perumusan kebijakan untuk mensukseskan pencapaian

MDGs. Selain itu, MDGs sejak dari awal juga dirumuskan secara top-down di level PBB yang berakibat pada kurangnya *national ownership* dari proyek MDGs.

“DPR RI telah mempunyai Panitia Kerja MDGs sejak tahun 2010 dan pada 2014 menjadi tuan rumah perhelatan parlemen untuk MDGs dan Agenda Pasca-2015 se-Asia Pasifik. Acara tersebut mengadopsi Deklarasi Surabaya yang menekankan pentingnya interaksi yang lebih kuat antara pemerintah dan parlemen. Namun, keterlibatan parlemen dalam hal kebijakan pelaksanaan MDGs belum dilibatkan secara penuh,” ujar Nurhayati.

Dalam paparannya, Ketua BKSAP DPR ini mengingatkan pentingnya peran parlemen di dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terlebih lagi parlemen mempunyai tiga fungsi untuk mengaktifkan perundang-undangan yang mendukung, memastikan alokasi anggaran diprioritaskan dan mengawal kebijakan dan pengawasan secara berkala. Selain itu, parlemen yang terlibat aktif di dalam agenda pembangunan global juga dapat memberikan rekomendasi dalam implementasi agenda pembangunan, mobilisasi sumber daya untuk

mendukung pencapaian SDGs dan sosialisasi tentang SDGs dengan bahasa yang lebih dimengerti masyarakat.

Di akhir paparan, Nurhayati Ali Assegaf menyitir draf mengenai keterlibatan parlemen yang disebutkan di dalam zero-draft UN Summit 2015—agenda KTT Dunia yang akan berlangsung pada September 2015 mendatang yang akan mengadopsi tujuan pembangunan baru pasca-2015. Dalam draf awal tersebut, keterlibatan parlemen ditekankan berkali-kali di beberapa bagian hingga empat paragraf yang pada intinya agar pemerintah membangun kolaborasi bersama dengan parlemen untuk kesuksesan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terkait itu, Nurhayati berujar, “Apa yang tersua dalam zero-draft secara eksplisit memberi mandat kepada parlemen untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring SDGs. SDGs adalah amanat konstitusi oleh karena itu saya mengajak sinergi antara pemerintah dan parlemen.”

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dalam kesempatan itu memaparkan mengenai ide untuk memasukkan dimensi baru pembangunan berkelanjutan selain ekonomi, sosial dan lingkungan yakni keseimbangan pembangunan antar-wilayah. Dimensi ini penting untuk memperkuat misi menghilangkan ketidaksetaraan yang masih mencuat baik di level global ataupun nasional.

Seperti diketahui, tahap negosiasi agenda pasca-2015 yang dipimpin oleh PBB mempunyai tujuan untuk menciptakan agenda pembangunan universal yang dapat diadopsi semua negara dan mengupayakan komitmen negara terhadap ketiga dimensi pembangunan, sosial, ekonomi dan lingkungan. Negara anggota PBB diharapkan untuk mengadopsi agenda pasca-2015 pada bulan September 2015 nanti.

(BKSAP,mp), foto : dok. BKSAP/parle/hr.



Suasana buka bersama Pimpinan DPR dengan Presiden, Wapres, dan Kabinet Kerja serta Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Selasa (23/06). Foto: Denus/Parle/HR



Pimpinan DPR didampingi Pimpinan Komisi II dan III DPR menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Anggaran Pemilu Tahun 2013-2014 dari Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Kamis (18/06). Foto: Denus/Parle/HR



Tim Kunker Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisyam dengan Kepala Dinas Pendidikan Malang, Jawa Timur bahas Program Indonesia Pintar (PIP), Senin (22/06) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja BOPTN Komisi X DPR RI dipimpin Sohibus Iman berdialog dengan Gubernur Babel, Kadis Pendidikan, Rektor Universitas, dan Direktur Politeknik Manufaktur Babel, Senin (22/06). Foto: Naefuroji/Parle/HR